



## BUPATI BOALEMO

### PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 43 TAHUN 2021

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu penyesuaian perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *huruf a*, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

KABAG EKSPRES	DINAS/BADAN KANTOR	ASSA	SEKDA	WABUP
------------------	-----------------------	------	-------	-------

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG MELUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSD	SEKWA	WABUP
				

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	DINAS KAWILDA	ASST I	SEKDA	WABUP
----------------	------------------	-----------	-------	-------

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaa Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021.

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	ASSD	SEDA	WABD
				

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun berjalan atau tahun 2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KABUPOR	ASST II	SEKDA	WAB.
				

#### Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

#### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

#### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2021
- 4.2 Isu Strategis
- 4.3 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.4 Prioritas Program Pembangunan Daerah

#### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Target Indikator Kinerja dalam RKPD Perubahan

#### BAB VI PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh



Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) Penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SOPD sebagai bahan masukan.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun 2021, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABUPATEN GORONTALO	DINAS/SEKSI/DAK KANTOR	ASST	SEKTA	WABUP

Pasal 8

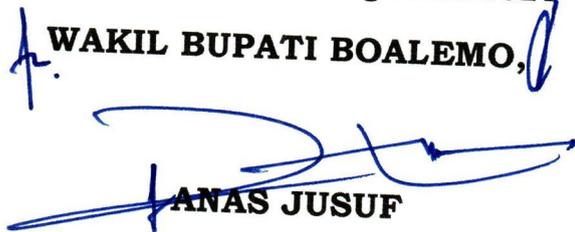
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 6 Agustus 2021

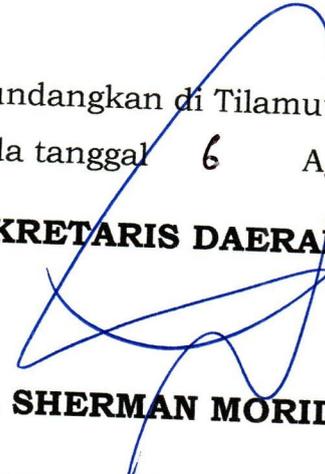
**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

  
**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 6 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

  
**DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 43.....)